BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung salah satu sumber dana terbesar bagi Negara yang sering dijadikan sebagai pendapatan utama adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan elemen penting dari pembangunan Negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan, terutama bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Indriani, : 2011).

Menurut Mardiasmo (2011: 23) bahwa:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagian besar Negara di dunia memiliki sistem perpajakan yang secara teratur dan terencana dikelola untuk membiayai pemerintahan Negara. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik serta sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Tamboto, 2013).

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga Negara sebagai wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak

yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku karena sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia (Mardiasmo, 2011: 10). Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak. Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual dengan demikian, wajib pajak harus datang sendiri ke KPP untuk melaporkan SPT karena wajib pajak melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk *hardcopy* (dokumen) yang telah disediakan oleh KPP (www.ortax.org).

Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Gorontalo dilaporkan SPT secara manual, hal ini menyebabkan bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajak khususnya Pengusaha kena pajak (PKP) menjadi tidak optimal. Pelaporan SPT Masa PPN secara manual belum efisien dan masih memiliki kelemahan, Salah satunya dipihak wajib pajak khususnya bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) sebanyak 25 dokumen kepada kantor pelayanan pajak (KPP), hal ini menambah biaya kepada wajib pajak dan juga jumlah wajib pajak Badan yang melakukan administrasi perpajakan tidak sebanding dengan jumlah petugas pajak yang menangani pelaporan SPT, dilihat dari komputer yang memiliki aplikasi penginputan SPT hanya tersedia enam buah komputer, sehingga pelaporan SPT menyebabkan antrian yang panjang yang akhirnya wajib pajak harus menunggu terkadang wajib pajak tidak lagi terpanggil karena dibatasi oleh jam pulang, wajib pajak yang lapor SPT harus kembali esok hari sehingga terjadi penundaan dan mengakibatkan denda kepada wajib pajak.

Petugas pajak atau fiskus, terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk menangani jumlah SPT dalam lampiran lainnya yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah fiskus yang menangani. Sementara proses

perekaman data yang membutuhkan ketelitian dan tenaga kerja yang banyak, penyimpanan dan keamanan data, pemeriksaan data yang membutuhkan waktu yang panjang dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau lampiran yang terkait, sampai melakukan konfirmasi kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Selain itu dapat menyebabkan kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Melihat kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Menurut Sripeni, (2011) Modernisasi perpajakan meliputi 3 hal, yaitu reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Pertama, reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU perpajakan, UU PPh dan UU PPN. Kedua, reformasi administrasi terkait dengan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pengawasan dilakukan melalui komisi kode etik yang mencantumkan kewajiban dan larangan pegawai, melalui compliance center untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan masalah dalam perpajakannya.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah diterapkannya e-SPT yang merupakan

aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Menurut Pandiangan, (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.
2. Bagi wajib pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan wajib pajak ditetapkan.

Penerapan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT) yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan tujuan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT karena pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat,

dan aman melalui jaringan internet dimana saja, kapan saja dan dari manapun serta mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan karena wajib pajak hanya mencetak SPT induk tidak lagi melampirkan sebanyak 25 dokumen dalam 1 masa pajak, system e-SPT ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan SPT Masa PPN karena dapat diakses kapanpun dan dari manapun, tidak terbatas pada jam kerja dan lokasi tertentu. efisiensi pelaporan SPT Masa PPN merupakan sejauh mana ketepatan cara dan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak dalam menerapkan segala kebijakan dibidang perpajakan terhadap pelaporan data yang ada apakah telah menggunakan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum, sehingga dapat dirasakan oleh semua pihak baik pegawai pajak maupun wajib pajak mengenai manfaat yang diperoleh dari pelaporan SPT masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT. (Djuanda, G. 2011:55-59).

Pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan e-SPT, maka pengusaha kena pajak (PKP) tidak perlu melaporkan SPT dalam lampiran SPT dengan jumlah yang banyak yaitu 25 dokumen dalam 1 masa pajak karena pengisian dan pelaporan SPT dengan menggunakan e-SPT telah berbentuk rekaman SPT secara *digital* seperti dalam bentuk *Flash Disc* atau *Compact Disc* (CD) dan dalam bentuk disket, maka para aparat pajak

atau fiskus cukup mengcopy data SPT yang dilaporkan secara digital oleh wajib pajak. (Afrika, 2014: 2-3)

Dengan adanya sistem ini para wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak, dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). penggunaan e-SPT (Masa PPN) dapat mengurangi beban proses administrasi pelaporan pajak serta penggunaan kertas. Selain itu, transisi cara penyampaian dan pelaporan SPT (Masa PPN) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.(www.infopajak.com).

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo jumlah wajib pajak Badan yang menyampaikan e-SPT Masa PPN selama 3 tahun mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2014 mengalami penurunan. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Wajib Pajak Badan Yang Lapori e-SPT Masa PPN

Tahun pajak	Wajib Pajak Badan yang Lapori e-SPT	Wajib Pajak Badan yang Lapori e-SPT (Masa PPN)
2010	17	15
2011	62	58
2012	80	78
2013	1431	1420
2014	1437	1257

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 hingga 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT Masa PPN ke kantor pelayanan pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer bagi pengusaha kena pajak (PKP) khususnya wajib pajak badan mengalami peningkatan akan tetapi ditahun 2014 mengalami penurunan hal tersebut disebabkan wajib pajak tidak konsisten dengan system yang digunakan ada wajib pajak yang sebelumnya telah menggunakan e-SPT, namun pada masa pajak berikutnya wajib pajak tersebut kembali menggunakan system manual. Apabila jumlah faktur pajak yang dilaporkan lebih dari 25 faktur pajak maka wajib pajak tersebut menggunakan e- SPT. Namun apabila pada masa pajak berikutnya jumlah faktur pajak tidak lebih dari 25 faktur pajak, maka wajib pajak tersebut kembali menggunakan system manual. Mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi wajib menggunakan e-SPT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010

tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan oleh karena kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara.

SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Pengguna elektronik ini dilakukan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib.

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan e-SPT telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Juhardini mengenai efektivitas elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efektivitas e-SPT PPN mendapatkan prosentase sebesar 68,5% dengan kategori efektif. Sedangkan untuk sub-variabel jumlah hasil yang dikeluarkan mendapatkan prosentase sebesar 70,1% (efektif). Kemudian sub-variabel tingkat kepuasan yang diperoleh mendapatkan prosentase sebesar 75,1% (efektif). Selanjutnya untuk sub-variabel produk kreatif mendapatkan prosentase

sebesar 57,7% (cukup efektif). Sub-variabel yang terakhir yaitu intensitas yang dapat dicapai mendapatkan prosentase sebesar 71,2% (efektif).

Penelitian Tamboto (2013) yang berjudul pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT Masa PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Manado. pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dengan variabel independennya yaitu penerapan e-SPT Masa PPN sedangkan variabel dependennya adalah efisiensi pengisian SPT Masa PPN. Hasil penelitian yang dilakukan Tamboto (2013) adalah Penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado.

Penelitian Appriliani (2012) dengan judul pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. variabel independennya yaitu penerapan e-SPT sedangkan Variabel dependennya yaitu efisiensi pemrosesan data perpajakan. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. pada penelitian yang di lakukan oleh appriliani (2012) memperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT Masa PPN, untuk mengetahui sejauhmana efisiensi pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT khususnya di Kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu wajib pajak badan yang lapor SPT Masa PPN mengingat dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pelaporan SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak diwajibkan menggunakan e-SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini wajib pajak badan. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT (Masa PPN) “**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelaporan SPT secara manual di KPP Pratama Gorontalo masih memiliki kelemahan salah satunya dipihak wajib pajak khususnya bagi wajib pajak yang melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu lampiran SPT dalam 1 (satu) masa pajak harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) sebanyak 25 dokumen kepada kantor pelayanan pajak (KPP)
2. Jumlah wajib pajak badan yang melakukan administrasi perpajakan tidak sebanding dengan jumlah petugas pajak yang menangani wajib pajak yang melaporkan SPT, sehingga pelaporan SPT di KPP Pratama Gorontalo belum efisien dilihat dari komputer yang memiliki aplikasi penginputan SPT hanya tersedia enam buah komputer, sehingga pelaporan SPT menyebabkan antrian yang panjang yang akhirnya wajib pajak harus menunggu terkadang wajib pajak tidak lagi terpanggil karena dibatasi oleh jam istirahat dan jam pulang dan harus kembali esok hari sehingga terjadi penundaan dan mengakibatkan denda kepada wajib pajak.
3. Petugas pajak atau fiskus, terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk menangani jumlah SPT dalam lampiran lainnya yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah fiskus yang menangani. Sementara proses perekaman data yang membutuhkan ketelitian dan tenaga kerja

yang banyak, penyimpanan dan keamanan data, pemeriksaan data yang membutuhkan waktu yang panjang dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau lampiran yang terkait, sampai melakukan konfirmasi kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: “Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT (Masa PPN) terhadap efisiensi pelaporan SPT (Masa PPN) ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e- SPT (Masa PPN) terhadap efisiensi pelaporan SPT (Masa PPN).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep dan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu akuntansi khususnya dibidang perpajakan. Selain itu diharapkan juga sebagai acuan/referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama.

1.5.2 Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masalah yang berhubungan dengan topik dari suatu penelitian kepada berbagai kalangan dan juga menjadi bahan pengetahuan yang lebih bermanfaat.